

STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) DI HUTAN LINDUNG PULAU SAPARUA NEGERI PORTO KECAMATAN SAPARUA KABUPATEN MALUKU TENGAH

COMMUNITY FOREST MANAGEMENT STRATEGY (HKM) IN THE PROTECTED FOREST OF SAPARUA ISLAND, PORTO VILLAGE, SAPARUA SUBDISTRICT, CENTRAL MALUKU REGENCY

Oleh

Lucky Tetelepta¹⁾, Gun Mardiatmoko²⁾, Debby V Pattimahu³⁾

Prodi Magister Manajemen Hutan, Universitas Pattimura

Jl Ir M Putuhena, Kampus Poka Ambon, 97233.

Email: lukastetelepta@gmail.com

Diterima: 18 Juni 2025

Direview: 18 September 2025

Disetujui: 9 Oktober 2025

Dipublish: 21 Oktober 2025

Abstrak

Adapun tujuan dalam Penelitian ini menganalisis kondisi ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, serta menganalisis strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm). Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Nopember 2023 di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan sampel dilakukan dengan memilih kelompok (HKm) Amapolo beranggotakan 20 responden dan 10 informan kunci, dengan metode *purposive sampling* (Sugiyono 2017). Penentuan sampel mempertimbangkan beberapa indikator yaitu anggota yang aktif, umur produktif, dan petani cengkih di dalam hutan kemasyarakatan, kapasitas dan pengetahuan responden dalam memberikan informasi secara lengkap dan relevan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dan SWOT. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Aspek ekologi: Areal HKm Amapolo adalah hutan lindung yang mendukung kesuburan tanah dan air. Aspek ekonomi: petani belum merasakan manfaat langsung dari program pengembangan ekonomi berupa kopi tuni di HKm. Aspek sosial: Program HKm Amapolo belum berkembang dengan baik. Menurut hasil pembobotan dari diagram SWOT faktor internal dan eksternal, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal kekuatan mencapai 1.81; faktor internal kelemahan mencapai 1.67; dan faktor eksternal peluang mencapai 1.91; dan faktor eksternal ancaman mencapai 1.80. Posisi strategi pengembangan hutan kemasyarakatan berada di kuadran 1 dengan nilai koordinat (0.14; 0.11).

Keyword: Strategi pengelolaan HKm, Hutan lindung, Pulau Saparua, Maluku Tengah

Abstract

The objectives of this study are to analyze the ecological, economic, and social conditions of communities managing community forests (HKm), to assess the current management strategies, and to formulate alternative management strategies. The research was conducted from August to November 2023 in Porto Village, Saparua Subdistrict, Central Maluku Regency. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The research sample consisted of members of the Amapolo HKm group, comprising 30 farmers, selected using purposive sampling (Sugiyono, 2017). The sample selection was based on several indicators, such as active membership, productive age, involvement in clove farming within the HKm area, and the respondents' capacity and knowledge to provide complete and relevant information. The data were analyzed using qualitative descriptive analysis and SWOT analysis. The findings revealed the following: Ecological aspect – the Amapolo HKm area is a protected forest that supports soil and water fertility; Economic aspect – the farmers have not yet experienced direct economic benefits from the tuni coffee development program within the HKm; Social aspect – the HKm program in the Amapolo group has not developed effectively. Based on the weighting results of the SWOT analysis for internal and external factors, the scores were as follows: internal strengths (1.81), internal weaknesses (1.67), external opportunities (1.91), and external threats (1.80). The strategic position of community forest management development is located in Quadrant I, with coordinate values of (0.14; 0.11).

Keywords: Community forest management strategy, Protected forest, Saparua island, Central Maluku

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi yang terletak di timur Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi geografis Provinsi Maluku adalah wilayah darat dan laut yang meliputi pulau-pulau besar dan kecil. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Provinsi Maluku memiliki wilayah seluas 712.479,69

km². Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas 658.294,69 km² (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.185 (7,6%). Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dengan jumlah pulau besar dan kecil sebanyak 1.340 pulau.

Pulau Saparua memiliki luas wilayah pulau < 2.000 km², sehingga dikategorikan sebagai Pulau Kecil (UU No 1 tahun 2014). Luas Pulau Saparua 168,1 km² (16,810 ha) dan terdiri dari hutan lindung seluas 61,56 km² (36,62%) dan areal penggunaan lain seluas 106,54 km² (63,38%). Hutan lindung di Pulau Saparua ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 854/Menhut-II/2004 tanggal 29 September 2004. Hutan Lindung Pulau Saparua (HLPs) merupakan formasi hutan tropis, memiliki fungsi penting perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah yang perlu dipertahankan dan wajib dilindungi.

Berdasarkan peta tutupan lahan Pulau Saparua, dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar luas hutan Pulau Saparua sudah merupakan areal yang tidak berhutan. Secara perhitungan digitasi diketahui areal yang tidak berhutan seluas 15.872 ha (94,43%) dari luas pulau saparua (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2023). Besarnya persentase areal tidak berhutan mengindikasikan bahwa kondisi hutan Pulau Saparua saat ini sudah mengalami kerusakan. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Negeri Porto diketahui bahwa sebagian besar kerusakan hutan diakibatkan oleh adanya aktifitas masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan, yang sering melakukan kegiatan seperti penebangan hutan, perburuan satwa, serta perladangan berpindah. Aktivitas ini juga didukung oleh akses masyarakat yang mudah masuk ke dalam kawasan hutan. Selain itu, tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat yang rendah serta pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya hutan juga menjadi ancaman bagi kelestarian hutan lindung Pulau Saparua.

Program perhutanan sosial adalah program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses pengelolaan dan peningkatan kapasitas usaha melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, berkeadilan, dan lestari dengan tetap menjaga fungsi hutan (Kaskoyo et al. 2017). Program ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Perhutanan Sosial hadir sebagai Program yang mendorong *Reforestasi* bukan *Legalisasi Deforestasi*. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah sebagai *Rationality Of Government* di mana peran pemerintah sebagai fasilitator dan pendorong dalam proses pengelolaan perhutanan sosial.

Dalam hal ini, masyarakat/kelompok Perhutanan Sosial diharapkan mendapatkan pemberdayaan masyarakat secara intensif dan dalam jangka waktu 35 tahun masa pengelolaan hutan. Perhutanan sosial dilaksanakan melalui pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial (Puspasari et al.,2017; Zeilika et al.,2021). Tujuan dari skema HKm Adalah mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar lebih mampu dan berdaya (Safe'i et al., 2018). Dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan diharapkan ketergantungan akan hutan lebih berkurang dan mengurangi tingkat kerusakannya (Rosmalia dan Ratnasari 2016; Zeilika et al.,2021). Kegiatan-kegiatan di lapangan antara lain peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan, devolusi dan desentralisasi kewenangan Menteri sampai ditingkat tapak seperti perencanaan kawasan dan penguatan usaha (BPSKL Maluku Papua, 2022).

Hingga akhir tahun 2023, realisasi skema hutan kemasyarakatan telah mencapai 33.573 hektar (23%) dari total izin Perhutanan Sosial yang ada di Provinsi Maluku. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program hutan kemasyarakatan mencapai 3.721 orang. Secara nasional, hutan kemasyarakatan

menyumbang 18,36% dari total capaian program perhutanan sosial. Provinsi Maluku menempati urutan ke-10 dalam hal luasan izin hutan kemasyarakatan (HKm) berdasarkan data Ditjen PSKL tahun 2023. HKm memberikan kontribusi sebesar 46,3% dari total pencapaian program perhutanan sosial. Sedikitnya 81 kelompok Tani Hutan (KTH) Provinsi Maluku telah menerima izin hutan kemasyarakatan sementara. Izin ini memungkinkan KTH untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal dan berkelanjutan.

Pemberian persetujuan Perhutanan Sosial di Hutan Lindung meliputi Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan/atau Kemitraan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021. Melihat latar belakang pemanfaatan dan pengelolaan lahan hutan yang ada pada masyarakat Negeri Porto, maka kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) bersama fasilitator mengusulkan lahan garapan mereka yang berada dalam hutan lindung melalui program perhutanan sosial untuk mendapatkan akses legal dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung. Pada tahun 2020 Negeri Porto memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 800 hektar di hutan lindung Pulau Saparua (HLPS) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui program ini, masyarakat Negeri Porto yang masuk dalam kelompok tani hutan (poktan) HKm diberikan kesempatan untuk secara langsung berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan memperoleh manfaat ekonomi dari produk hutan. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan dan keberhasilan aktivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Sehubungan dengan itu maka diperlukan suatu konsep untuk memahami peranan masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan lindung yang terarah dan tertata, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktek pengelolaan HKm yang sudah memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial serta merumuskan strategi pengelolaannya dengan tepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Menganalisis kondisi ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan, penentuan strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di Hutan Lindung Pulau Saparua, dan merumuskan alternatif strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-Nopember 2023 di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. Lokasi penelitian adalah areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Amapolo Negeri Porto. Pemilihan lokasi ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut didasarkan pada (1) mendapatkan izin pengelolaan HKm, (2) kearifan lokal dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pengolahan data dilakukan di Ambon dari Januari-Desember 2024. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data (Sugiyono 2017). Menurut (Creswell dan Poth 2016) yang menjelaskan bahwa observasi bersifat terbuka, dengan peneliti mengajukan pertanyaan umum kepada peserta, yang memungkinkan mereka untuk mengatakan pendapat mereka secara bebas. Proses wawancara dengan peserta dilakukan secara pribadi. Selain itu, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang dapat diakses publik, seperti buku, jurnal, makalah, dan laporan.

Menurut (Sugiyono 2017), observasi adalah proses yang kompleks yang mencakup berbagai tindakan biologis atau psikologis. Selain itu, menurut (Patton 1990), observasi adalah cara penelitian yang sangat penting untuk memahami fenomena yang diteliti dan memperkaya pengetahuan. Dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku

dan aktivitas subjek. Peneliti dapat terlibat langsung dalam pengumpulan data atau hanya mengamati. Peneliti menggunakan teknik observasi terstruktur sebagai instrumen, dengan membuat sejumlah pertanyaan atau daftar isian, dan peneliti langsung melihat secara langsung kondisi alam dan lingkungan sebagai tindak koreksi dari jawaban narasumber yang sudah diwawancarai, selain itu juga melihat kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan kelompok. Hal-hal inilah yang diamati peneliti saat di lapangan. Interview (wawancara), peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara untuk memudahkan proses wawancara dengan narasumber atau informan penting. Peneliti juga menggunakan kamera untuk memotret saat berbicara dengan informan dan rekaman untuk merekam hasil wawancara. Metode ini meningkatkan kredibilitas penelitian. Salah satu hal penting yang akan dibahas dalam wawancara adalah kondisi terkini HKm secara kelembagaan, sosial, ekonomi, dan ekologi, wawancara terstruktur ini dilakukan kepada anggota kelompok HKm. Selain itu juga dilakukan wawancara langsung dengan informan kunci atau stakeholder kunci dalam pengelolaan HKm yakni pengurus poktan, anggota KTH, Pendamping dari KPHL Kota Ambon, Pengepul, Bendahara Poktan, Akademisi, Kepala Bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Staf pada BPSKL Maluku Papua dan Kepala Seksi pada BPDASHL Way Hapu Batumerah.

Dokumentasi dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan pengetahuan dan informasi yang berasal dari arsip, buku, dokumen, tulisan, gambar, dan dokumen dalam bentuk laporan dan informasi pendukung penelitian (Sugiyono, 2017). Salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen publik yakni transkrip, catatan, buku, surat kabar, majalah, data BPS, jurnal ilmiah, dan lainnya. Metode penentuan populasi sampel, Penelitian ini memilih kelompok tani hutan kemasyarakatan (HKm) Amapolo. Poktan Amapolo beranggotakan 26 petani. Sampel responden untuk penelitian ditentukan dengan *purposive sampling* (Sugiyono 2017). Di mana teknik penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu.

Responden yang diambil dalam penelitian ini mempertimbangkan kriteria anggota yang aktif, umur produktif, dan petani cengkih di dalam hutan kemasyarakatan, kapasitas dan pengetahuan responden dalam memberikan informasi secara lengkap dan relevan. Seperti yang dinyatakan oleh (Cohen et al., 2000), jumlah sampel yang diambil oleh peneliti sekitar 30 responden. Hal ini memenuhi kriteria ukuran sampel berdasarkan kriteria (Gay et al., 2012) bahwa sampel 30 responden diperlukan untuk studi korelasional. Dalam Penelitian ini menggunakan 20 responden yang merupakan anggota poktan Amapolo aktif dan 10 responden adalah infoman kunci (*key informan*), total reponden untuk penelitian ini adalah 30 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui nilai ekonomi dengan menggunakan rumus:

$$TEV : UV + NUV (DW+IUV+OV) + (XV+BV)$$

Keterangan :

- TEV : Total Economic Value
- IUV : *Indirect Use value* (Nilai penggunaan tidak langsung)
- UV : *Use value* (Nilai guna)
- OV : *Option value* (Nilai pilihan)
- NUV : *Non Use value* (Nilai non langsung)
- XV : *Existence value* (Nilai keberadaan)
- DUV : *Direct Use value* ((Nilai guna langsung)
- BV : *Bequest value* (Nilai warisan)

Untuk mengkaji analisis stakeholders menggunakan analisis stakeholder dengan kriteria dan pembobotan scoring, sedangkan strategi pengelolaan menggunakan analisis SWOT dengan mengidentifikasi IFAS dan EFAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

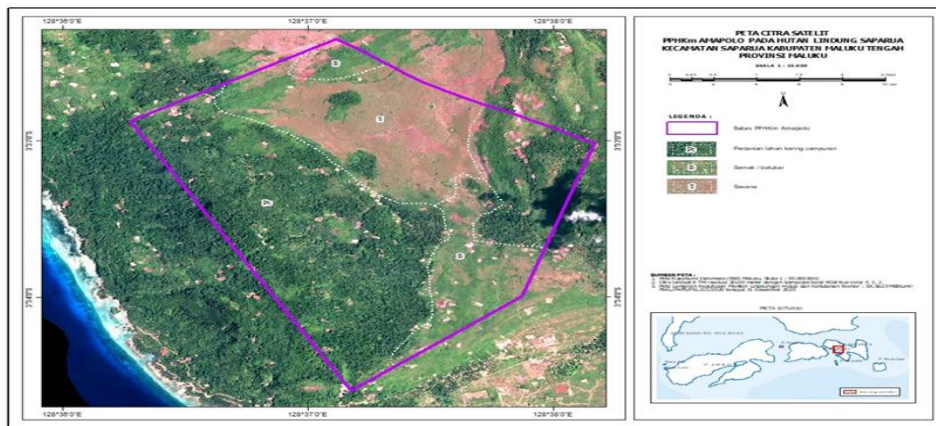
Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi HKm Amapolo

Kondisi Ekologi HKm Amapolo

Penentuan kegiatan pengamatan terhadap kondisi ekologi pada lokasi penelitian dilakukan setelah memperoleh data awal yang bersumber dari hasil analisis spasial.

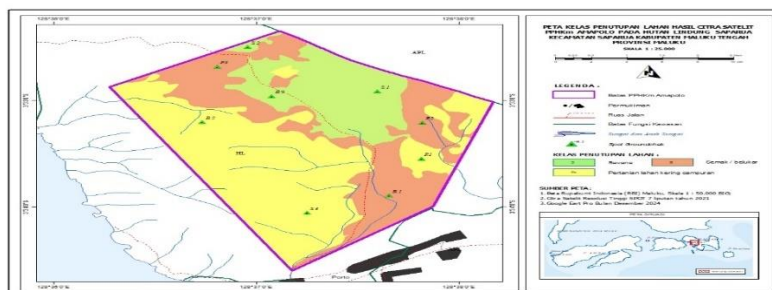
1. Analisis Spasial Areal HKm Amapolo

Penutupan lahan maupun penggunaan lahan umumnya didapatkan dari hasil interpretasi dan klasifikasi citra satelit (analisis spasial) yang banyak digunakan untuk menganalisis penggunaan lahan atau dinamika perubahan lahan pada suatu areal. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi awal tentang kondisi ekologi pada lokasi penelitian dilakukan penafsiran citra resolusi tinggi (SPOT-7) yang akan menyajikan kondisi awal sebelum dilakukan identifikasi lapangan (*groundcheck*). Hasil penafsiran citra lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lokasi pengambilan data

Setelah dilakukan klasifikasi diperoleh kelas penutupan lahan pada lokasi penelitian berupa areal non hutan yang terdiri dari semak belukar, pertanian lahan kering campuran dan savana. Berdasarkan data penutupan lahan tersebut ditentukan spot pengamatan ekologi dan biofisik mewakili kelas penutupan lahan yang ada sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan identifikasi lapangan pada areal kerja IUPHKm Amapolo di Hutan Lindung Pulau Saparua. Hasil penafsiran citra satelit selanjutnya digambarkan dalam bentuk peta kelas penutupan lahan yang tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta kelas penutupan lahan lokasi penelitian

Secara tabulasi penutupan lahan pada areal HKm Amapolo hasil interpretasi citra satelit ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kelas penutupan lahan areal HKm Amapolo

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
1.	Pertanian lahan kering campur semak	391	48,88
2.	Savana	163	20,38
3.	Semak belukar	246	30,75
Jumlah		800	100,00

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa areal HKm Ampolo didominasi oleh pertanian lahan kering campur semak seluas 391 ha (48,88%), kemudian semak belukar seluas 246 ha (30,75%) dan savana seluas 163 ha (20,38%) dan untuk mengetahui kondisi eksisting pada areal HKm, dilakukan identifikasi lapangan (*groundcheck*).

2. Identifikasi Lapangan (*Groundcheck*)

Pelaksanaan *groundcheck* dilakukan dengan membagi lokasi penelitian menjadi tiga spot pengamatan (*observation spot*) yang dimulai dari spot pengamatan pertama dengan kelas penutupan lahan pertanian lahan kering campur semak, spot pengamatan kedua dengan kelas penutupan lahan savana dan spot pengamatan ketiga dengan kelas penutupan lahan semak belukar. Masing-masing kelas penutupan lahan terdiri dari 3 titik pengamatan. Kegiatan *groundcheck* menggunakan alat ukur posisi (GPS) untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan dan karakteristik penggunaan lahan yang ada pada lokasi penelitian. Secara keseluruhan titik pengamatan lapangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Titik pengamatan lapangan

No.	Kode Point	Koordinat UTM		Kelas Penutupan Lahan
		X	Y	
1	P.1	458932	9606593	Pertanian Lahan Kering Campuran
2	P.2	458941	9607214	
3	P.3	457067	9608180	
4	S.1	458533	9607753	Savana
5	S.2	457346	9608522	
6	S.3	457886	9605656	
7	B.1	458636	9605953	Semak Belukar
8	B.2	456929	9607225	
9	B.3	457563	9607669	

Sumber : Data Primer Diolah

Hasil identifikasi lapangan (*groundcheck*) menunjukkan bahwa terdapat vegetasi berkayu pada spot pengamatan pertama (titik P.1, P.2, P.3) seperti jati (*Tectona grandis*), salawaku (*Albizia falcataria*), linggua (*Pterocarpus indicus*), palaka (*Octomeles sumatrana*), kenari (*Canarium sp*), cengkik (*Syzygium aromaticum*), dan pala (*Myristica fragrans*), yang penyebarannya tidak merata dalam areal HKm. Vegetasi berkayu yang ditemui umumnya adalah tanaman yang dipelihara oleh masyarakat dalam areal petuanan (dusung), dan potensi kawasan lainnya seperti daerah keramat (negeri tua).

Pada spot pengamatan kedua (S.1, S.2, S.3) di areal HKm umumnya dipenuhi oleh hamparan alang-alang dan lahan kosong bekas kebakaran hutan, vegetasi berkayu yang ditemui berupa tanaman perdu seperti timonius timon (*Spreng*) dan macaranga (*Macaranga bancana*). Hamparan savana yang cukup luas dapat dimanfaatkan sebagai lahan rehabilitasi. Spot pengamatan ketiga (B.1, B.2, B.3) banyak dijumpai kebun masyarakat yang ditanami tanaman musiman. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Negeri Porto, menuturkan bahwa masyarakat Negeri Porto 80% bermata pencaharian

sebagai petani. Tradisi pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam sudah berlangsung sejak turun temurun, sistem pembukaan lahan baru dilakukan dengan cara menebang pohon dan membakarnya sehingga menyebabkan berkurangnya vegetasi berkayu dan menimbulkan semakin banyak areal semak belukar. Jenis vegetasi berkayu yang dijumpai pada jalur pengamatan ketiga berupa kelapa (*Cocos nucifera*), langsung (*Lansium domesticum*), duku (*Lansium domesticum*), dan gandaria (*Bouea macrophylla*).

Terdapat potensi HHBK yang bernilai ekonomis antara lain: pala (*Myristica fragrans*), cengkih (*Syzygium aromaticum*), kelapa (*Cocos nucifera*), sagu (*Metroxylon sagu*), bambu (*Bambuseae*), Aren (*Arenga pinnata*), ubi-ubian seperti talas (*Colocasia esculenta* L.), ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), singkong (*Manihot esculenta*) dan satwa seperti babi hutan (*Sus scrofa*) dan kuskus (*Phalanger ornatus*). Namun demikian, masyarakat belum mengembangkan komoditi-komoditi tersebut sebagai suatu unit usaha komersial yang memberikan pendapatan yang tinggi bagi masyarakat secara berkelanjutan (Makkarennu, 2018). Awang, (2003) mengemukakan bahwa pemanfaatan HHBK hanya dilakukan secara tradisional sehingga nilai produk masih sangat rendah. Kebanyakan dari masyarakat hidup pada tingkat ekonomi yang sangat subsisten. Lebih lanjut, Kadir, et al., (2012) juga mengemukakan bahwa salah satu permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat bahwa dalam pemanfaatan sumberdaya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adam et al., (2013) menyatakan bahwa potensi produk HHBK sebagai salah satu penghasil devisa negara belum maksimal dilakukan.

HHBK merupakan potensi pendukung sebagai komoditas kehutanan, yang mampu menyelamatkan eksploitasi terhadap sektor kehutanan selagi potensi hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan dengan baik. Hasil hutan non kayu ini bisa dikatakan amat menguntungkan, sebab dari satu jenis saja masyarakat dapat memanfaatkan bagian-bagian dari suatu jenis tumbuhan tersebut. Mulai dari pemanfaatan daunnya, akar, ataupun buahnya. Pendayagunaan HHBK sangat beragam, mulai dari pemenuhan kebutuhan, seperti barang-barang penghias bahkan sebagai obat-obatan (Al Fajar dan Sa'roni, 2022).

Selain HHBK, pada areal HKm terdapat sumber mata air yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi jasa lingkungan serta areal terbuka untuk peningkatan gerakan rehabilitasi hutan dan agroforestry. Secara keseluruhan data kondisi ekologi areal pengelolaan HKm Amapolo hasil identifikasi lapangan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Kondisi ekologi areal HKm Amapolo

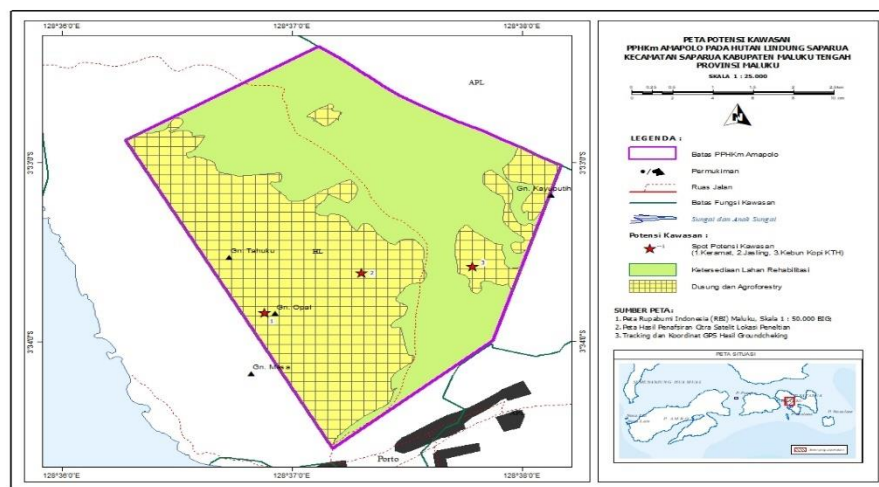
No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1.	Hasi Hutan Kayu	- Kayu Jati	Tersebar secara acak dalam areal HKm, diambil khusus untuk bahan bangunan (tiang rumah).
		- Linggua	Tersebar secara acak dalam areal HKm, dimanfaatkan untuk mebel.
		- Salawaku	Tersebar secara acak dalam areal HKm, dimanfaatkan untuk mebel.
		- Kenari	Tersebar secara acak dalam areal HKm, dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan buahnya berupa kacang kenari untuk dikonsumsi dan dijual
2.	Hasil Hutan Bukan Kayu	- Pala	Tersebar acak dalam areal HKm, diambil buahnya untuk dijual berupa daging buah untuk manisan pala, fuli dan biji pala sebagai bahan baku industri.
		- Cengkeh	Tersebar acak dalam areal HKm, diambil bunganya untuk dijual.
		- Kelapa	Dimanfaatkan Buahnya untuk kopra

- Sagu Penyebaran tidak merata, dimanfaatkan daun, sari pati, kulit batang, tulang daun.
Saat ini sementara diolah (dimanfaatkan) oleh KTH Amapolo.
- Bambu Penyebaran tidak merata, terdiri lebih kurang 5 jenis, dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Sumber : Data Primer Diolah

2. Potensi Kawasan HKm Amapolo

Data GPS diolah melalui analisis spasial untuk memperoleh informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif (atribut) terhadap data identifikasi potensi kawasan pengelolaan HKm dengan menggunakan aplikasi ArcGis 10.8. Adapun peta potensi kawasan pengelolaan IUPHKm dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Peta potensi kawasan Areal HKm Amapolo

Gambar 3 menunjukkan adanya potensi kawasan yang akan disajikan dalam bentuk tabulasi seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Potensi kawasan HKm Amapolo

No.	Potensi kawasan	Kategori Manfaat TEV
1.	Negeri tua (keramat)	Pilihan
2.	Stock karbon (ekologi)	Tidak langsung
3.	Jasa lingkungan (Mata Air)	Tidak langsung
4.	HHBK pala	Langsung
5.	HHBK cengkih	Langsung
6.	HHBK sagu	Langsung
7.	Dusun milik (Kearifan lokal)	Langsung
8.	Rehabilitasi (Ketersediaan lahan)	Pilihan
9.	Agroforestry (Budaya)	Pilihan

Hasil wawancara dan *groundcheck* yang dilakukan di lapangan, terdapat beberapa jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani HKm Amapolo baik sebagai sumber pendapatan mereka maupun digunakan untuk keperluan rumah tangga. Adapun jenis-jenis HHBK yang sudah

dimanfaatkan oleh masyarakat yang diperoleh dari wilayah HKm di antaranya, cengkih, pala, sagu, pisang, kelapa, kenari, singkong, talas, dan ubi-ubian. Saat ini petani HKm sedang mengelolah sagu menjadi bahan pakan (sagu mantah) menggunakan alat ekonomi produktif bantuan dari Pemerintah Daerah dan didampingi oleh Pendamping Perhutanan Sosial (PS) dari KPH Kota Ambon, hasilnya dijual ke pasar dan pengepul (pedagang).

Permasalahan Dalam Pengelolaan HKm

Kelembagaan KTH diharapkan sebagai kunci dalam pengelolaan HKm terkadang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang organisasi dan kelembagaan itu sendiri. Ketika terbentuknya kelembagaan HKm, dari sisi masyarakat peran yang diberikan kepada mereka masih bersifat pasif, dan tidak mendorong mereka untuk lebih proaktif, padahal masyarakat lokal membutuhkan adanya pendampingan dan arahan dari berbagai pihak (Latupapua et al., 2015). Kondisi yang terjadi sebaliknya semakin banyak bantuan yang diberikan oleh para pihak, semakin membuat kelompok memiliki sifat ketergantungan yang besar terhadap stakeholder di luar HKm. Hal inilah yang membuat kelembagaan semakin mengandalkan bantuan dari pihak lain dan ingin difasilitasi terus-menerus oleh pendamping, penyuluh, atau dinas terkait. Demikian yang terjadi di poktan Amapolo, poktan sangat bergantung pada peran pendamping dari KPH, semua bentuk informasi, bantuan, kegiatan yang bersumber dari stakeholder lain tidak bisa dikelola oleh poktan secara langsung, mereka percayakan kepada pendamping untuk menerima, mengartikan dan membantu mengelolanya bersama poktan.

Selain masalah kelembagaan, ada pula permasalahan lain meliputi belum jelas batas kawasan hutan, keterbatasan sumber daya manusia, klaim lahan, kurangnya pengawasan, kendala teknis dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan poktan diketahui permasalahan keterbatasan sumber daya seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sementara untuk permasalahan klaim lahan adanya konflik antara masyarakat yang memiliki izin HKm dengan masyarakat yang belum memiliki izin, untuk permasalahan kurangnya pengawasan seperti pengawasan yang tidak partisipatif dan lemah dari pihak kehutanan dan permasalahan kendala teknis seperti kurangnya informasi dan panduan teknis yang jelas untuk pengelolaan HKm. Sementara itu, permasalahan batas kawasan hutan sesuai data yang terdokumentasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku diketahui bahwa Hutan Lindung Pulau Saparua belum dilakukan penataan batas sebagai proses pengukuhan suatu kawasan menjadi kawasan hutan definitif dengan tujuan memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Kondisi ini nantinya akan berpengaruh terhadap areal HKm kedepannya.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Pengelola HKm

1) Sumber pendapatan petani dari HLPS sebelum IUPHKm

Nilai ekonomi berupa manfaat langsung dari pemanfaatan HLPS sebelum adanya IUPHKm yang dimanfaatkan oleh petani KTH Amapolo terdiri atas:

- a. Cengkih, rata-rata produksi cengkih petani KTH Amapolo di Negeri Porto sebanyak 250 Kg dan 500 Kg per tahun dengan harga saat ini Rp 90.000,00 - Rp 95.000,00. Hasil produksi cengkih masyarakat bergantung pada musim panen di bulan Agustus sampai September. Pendapatan petani dari cengkih berkisar antara Rp 10.000.000 - Rp 40.000.000 pada musim panen dalam 1 tahun.
- b. Pala, kapasitas panen buah pala adalah 900-1200 buah pala gelondongan (utuh) per pohon atau 37,5–50,0 kg. Harga jual biji pala saat ini pada lokasi objek penelitian sebesar Rp 100.000 - Rp 120.000 dalam kondisi telah dikeringkan. Harga bunga pala yang melekat pada biji pala berwarna merah juga bernilai ekonomi dengan harga jual Rp 120.000,00 per kilo.
- c. Sagu, dimanfaatkan oleh petani sebelum adanya IUPHKm hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dalam jumlah yang banyak petani bisa menjualnya ke masyarakat dan ke pasar. Produksi sagu

mentah tanpa menggunakan mesin dapat menghasilkan 50-100 kg per 1 kali panen. Sedangkan produksi sagu mentah menggunakan mesin (alat ekonomi produktif) dapat mencapai 150-250 kg per satu kali panen.

- d. Buah-buahan, komoditas buah-buahan seperti duku, langsung, manggis, gandari, kenari dan pisang oleh masyarakat rata-rata 100-350 buah per musim atau 4-7 tandan per bulan untuk tanaman pisang. Komoditas ini ditanam di wilayah HKm yang dimiliki oleh anggota KTH. Harga jual per buah atau per wadah dimulai dari harga Rp 10.000 - Rp 20.000, untuk pisang 1 sisir Rp. 20.000 - 25.000.
- e. Ubi-ubian (talas, singkong, ubi jalar), tanaman talas tiap bulannya petani mampu memperoleh pendapatan sebesar Rp. 400.000 – Rp. 800.000,- dengan rata-rata produksi tiap kali panen sebanyak 50-100 kg biasanya dipanen 2 - 4 kali. Musim panen talas terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Talas juga diolah oleh KTH menjadi penganan khas seperti cakar-cakar yang dikerjakan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam KUPS dengan harga Rp. 15.000, per plastik. Biasanya diproduksi sebanyak 50 plastik per minggu atau sekitar 200 plastik per bulan dan dikalihkan dengan harga satuan maka total pendapatan dari olahan talas adalah sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan. Sedangkan singkong dapat dipanen setiap waktu, mengingat singkong tidak memiliki masa panen tertentu sehingga produksinya dapat berjalan sesuai kebutuhan pasar. Harga singkong per 1 tumpuk jual berkisar Rp10.000-Rp15.000/tumpuk.
- f. Kayu bakar dan bambu, kebutuhan akan kayu bakar saat ini mulai berkurang seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang sudah beralih menggunakan minyak tanah dan gas. Akan tetapi pada petani HKm Amapolo sebagian masih menggunakan kayu bakar sebagai cadangan bahan bakar. Harga jual kayu bakar di negeri porto per ikatnya Rp. 50.000. Kebutuhan akan bambu saat ini menurun, bambu hanya dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu seperti acara pesta pernikahan, upacara adat negeri dan syukuran keagamaan. Bambu dijual jika diminta oleh masyarakat dari luar desa dengan harga Rp. 100.000/ikat.
- g. Hewan buruan, seperti babi hutan dan kus-kus masih dapat ditemui dalam hutan lindung pulau saparua. Jenis hewan ini, selalu menjadi buruan masyarakat karena dianggap sebagai hama di kebun. Sehingga populasi kedua hewan ini menjadi berkurang dan sudah jarang ditemui. Biasanya petani menggunakan jerat untuk menangkap, kemudian dagingnya dijual dengan harga 50.000/kg untuk babi hutan sedangkan untuk kus-kus biasanya dijual 100.000/per ekor.

2) Nilai pendapatan petani dari HLPS setelah terbitnya IUPHKm

Nilai ekonomi yang dapat dihitung setelah adanya IUPHKm, bersumber dari nilai modal pengadaan bibit dan penanaman kopi tuni serta pengolahan sagu menggunakan alat ekonomi produktif.

- a. Budidaya kopi tuni, nilai ekonomi dari tanaman kopi tuni dapat diperoleh dari nilai modal pengadaan bibit tanaman sebesar Rp.17.000/anakan dikalikan jumlah bibit yang ditanam sebanyak 2.200 anakan dengan total nilai Rp.37.400.000,-. Umur masa panen tanaman kopi tuni berkisar antara 4 – 5 tahun. Tanaman kopi tuni baru ditanam di areal HKm Amapolo pada tahun 2023 dan sampai saat penelitian berlangsung kopi tuni belum memasuki masa panen, sehingga belum dapat dihitung nilai produksi dari tanaman tersebut. Diketahui harga pengadaan bibit dan peralatan tanaman kopi tuni per 1 hektar adalah Rp. 50.000.000 termasuk nilai guna ekonomi dan nilai guna sosial.
- b. Pengolahan sagu, adapun nilai ekonomi lainnya adalah pengolahan sagu menggunakan mesin (alat ekonomi produktif). Kapasitas produksi sagu menggunakan alat ini dapat mengolah sagu 4 pohon dalam satu bulan dengan rata-rata hasil produksi 1 pohon sagu dewasa menghasilkan 250 kg sagu mentah. Petani menggunakan karung ukuran 15 kg sebagai wadah untuk penampungan sagu olahan yang siap dijual dengan harga sebesar Rp.110.000,-/karung sehingga total harga produksi 1 pohon sagu mencapai Rp. 1.650.000,- dikalikan dengan 4 pohon maka total hasil produksi sebesar Rp. 6.660.000 per bulannya, jika dibagi kepada 9 orang petani pengelola, maka diketahui pendapatan petani dari pekerjaan pengolahan sagu per individu adalah sebesar Rp. 740.000/orang/bulan. Diketahui harga mesin pengolah sagu 1 unit beserta peralatan pendukungnya adalah sebesar Rp. 200.000.000 termasuk nilai guna kepemilikan (*ownership utility*).

B. Nilai Ekonomi Areal HKm

Menurut Fauzi (2002), nilai ekonomi adalah pengukuran jumlah maksimum seseorang ingin mengorbankan barang dan jasa untuk memperoleh barang dan jasa lainnya. Secara formal konsep ini disebut sebagai keinginan membayar (*willingness to pay*) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan menggunakan pengukuran ini, nilai ekologis dari sistem diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter dari barang dan jasa. Nilai ekonomi total sumber daya alam merupakan penjumlahan dari nilai guna (*use value*) dan non guna (*non use-value*). Nilai guna terdiri dari nilai guna langsung (*direct use value*), nilai guna tak langsung (*indirect use value*) dan nilai pilihan (*option value*). Nilai ekonomi total sumber daya alam merupakan penjumlahan dari nilai guna (*use value*) dan non guna (*non use-value*). Nilai guna terdiri dari nilai guna langsung (*direct use value*), nilai guna tak langsung (*indirect use value*) dan nilai pilihan (*option value*).

1. Nilai Guna Langsung (*Direct Use Value*)

Nilai guna langsung merupakan nilai yang dapat dirasakan oleh masyarakat terutama anggota KTH. Nilai ini berupa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu antara lain : cengkih, pala, durian, duku, langsung, gandaria, manggis, sagu, kelapa, bambu, kayu bakar, hewan buruan, dan ubi-ubian. Nilai manfaat langsung potensi ekonomi dari areal HKm Amapolo dalam HLPS disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Guna Langsung dari Areal HKm Amapolo

No	Jenis Hasil Hutan	Total Pengambilan	Unit	Frekwensi	Harga (Rp.)	Nilai Hasil Hutan (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cengkeh	500	Kg	Tiap tahun	95.000	47.500.000	15,93
2	Biji Pala	100	Kg	Tiap tahun	100.000	10.000.000	3,35
3	Bunga Pala	50	Kg	Tiap tahun	120.000	6.000.000	2,01
4	Durian	350	Buah	Tiap tahun	15.000	5.250.000	1,76
5	Duku	1500	Buah	Tiap tahun	15.000	22.500.000	7,54
6	Langsat	2500	Buah	Tiap tahun	10.000	25.000.000	8,38
7	Gandaria	1500	Buah	Tiap tahun	10.000	15.000.000	5,03
8	Manggis	1000	Buah	Tiap tahun	20.000	20.000.000	6,71
9	Kenari	2000	Buah	Tiap tahun	10.000	20.000.000	6,71
10	Kelapa	2500	Buah	Tiap tahun	10.000	25.000.000	8,38
11	Sagu	300	Kg	Tiap tahun	110.000	33.000.000	11,06
12	Bambu	20	Ikat	Tiap tahun	100.000	2.000.000	0,67
13	Kayu Bakar	150	Ikat	Tiap tahun	50.000	7.500.000	2,51
14	Talas (keladi)	1.500	Kg	Tiap tahun	25.000	37.500.000	12,57
15	Singkong	1.000	Kg	Tiap tahun	15.000	15.000.000	5,03
16	Pisang	60	Sisir	Tiap tahun	25.000	1.500.000	0,50
17	Babi Hutan	5	Ekor	Tiap tahun	1.500.000	7.500.000	1,51
18	Kus-kus	10	Ekor	Tiap tahun	100.000	1.000.000	0,34
Grand Total :						298.250.000	100

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 5 diketahui jumlah potensi ekonomi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) terbesar adalah buah cengkih total pengambilan lebih kurang 500 kg/tahun dengan harga jual pasar Rp. 95.000/kg, total nilai produksi/pengambilan sebesar Rp.47.500.000 (15,93%). Sedangkan potensi HHBK terendah adalah kus-kus yaitu 10 ekor per tahun dengan harga jual pasar Rp. 00.000/ekor, maka total nilai potensi pemanfaatan sebesar Rp.1.000.000 per ekor (0,34%) tiap tahun. Dengan demikian total keseluruhan nilai guna langsung dari HKm Amapolo dalam 1 tahun sebesar Rp.298.250.000.

2. Nilai Guna Tidak Langsung (*Indirect Use Value*)

a. Nilai Manfaat Air Rumah Tangga

Pada lokasi penelitian air bersih diperoleh dari sumur tampung yang bersumber dari air batang milik Negeri yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk menggunakan instalasi pipa dengan frekwensi 1 minggu 2 kali, masyarakat hanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 10.000 per bulan. Jika masyarakat membutuhkan air pada kondisi air tidak mengalir, maka masyarakat dapat membeli dari mobil tangki air ukuran tangki 1.500 liter dengan harga 1 tangki air sebesar Rp. 50.000.

Diketahui jumlah KK di Negeri Porto Tahun 2024 sebesar 854 KK dengan jumlah jiwa 2.681, sehingga diketahui nilai perhitungan biaya pengadaan air per KK tahun 2024 adalah 854×120.000 (10.000×12) = 102.480.000. Biaya pengadaan air per orang per tahun adalah $102.480.000 : 2.681$ jiwa = Rp. 38.225. Dengan berpatokan pada biaya pengadaan air tersebut diperoleh nilai air rumah tangga per orang di sekitar HLPS adalah sebesar Rp.38.225/orang/tahun. Nilai total air untuk rumah tangga masyarakat adalah sebesar Rp. 102.480.000/Tahun.

b. Nilai Penyerapan Karbon

Luas areal HKm Amapolo berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5627/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2020 adalah seluas 800 ha. Perhitungan nilai penyerapan karbon areal HKm Amapolo dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perhitungan Nilai Penyerapan Karbon Areal HKm Amapolo

Luas Areal (L)	Kemampuan Hutan Menyerap Karbon (Kc)	Harga Karbon (Hc)	Nilai Penyerapan Karbon ($NPc=LxKcxHc$)
800	115 ton/ha	US\$ 5x Rp.15.984	Rp. 7.352.640.000/tahun

Kemampuan menyerap karbon dapat dibagi menjadi 3 jenis sesuai Borwn dan Peace (1994) dalam Widada (2004), hutan alam primer, hutan sekunder dan hutan terbuka memiliki kemampuan penyimpanan karbon masing-masing sebesar 283 ton per hektar, 194 ton per hektar dan 115 ton per hektar. Berdasarkan hasil *groundchek* areal HKm Amapolo berpenutupan hutan terbuka (100%) dengan kemampuan penyerapan karbon sebesar 115 ton per hektar. Menurut Fahri (2002) dalam Alif (2005) harga karbon masih bervariasi, yaitu antara \$ 1 US sampai \$ 30 US per ton karbon. Untuk menghindari penilaian yang terlalu tinggi digunakan asumsi harga \$ 5 US per ton sesuai dengan pernyataan Alam (2007). Berdasarkan hasil perhitungan (kurs saat ini, tanggal 28 Nopember 2024 \$ 1 US = Rp. 15.984), telah didapat bahwa nilai penyerapan karbon di areal HKm Amapolo adalah sebesar Rp. 7.352.640.000/tahun.

c. Nilai Pilihan

Manfaat pilihan konservasi hutan dalam penelitian ini diperhitungkan berdasarkan manfaat keanekaragaman hayati yang dapat didekati dari pentingnya keberadaan hutan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Panduan Evaluasi Ekonomi Ekosistem Hutan, nilai manfaat keanekaragaman hayati hutan adalah sebesar US\$ 9.45/ha/tahun apabila keberadaan hutan tersebut secara ekologis penting dan tetap terpelihara relatif alami. Berdasarkan data luas areal HKm Amapolo sebesar 800 hektar tersebut diperoleh hasil perhitungan nilai pilihan (manfaat keanekaragaman hayati) untuk areal HKm Amapolo sebesar Rp. 120.839.040/tahun (kurs saat ini, tanggal 28 Nopember 2024 \$ 1 US = Rp. 15.984).

3. Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*)

Nilai ekonomi total HKm Amapolo adalah sebesar Rp.7.881.690.000/tahun atau Rp.9.852.113/tahun/hektar. Nilai ekonomi total diperoleh dari hasil menjumlahkan nilai guna langsung sebesar Rp. 298.250.000/tahun dengan nilai guna tidak langsung yaitu nilai manfaat air

rumah tangga Rp. 102.480.000/tahun dan nilai penyerapan karbon sebesar Rp.7.352.640.000/tahun, nilai pilihan sebesar Rp.120.839.040/ tahun. Perincian ini seperti tertera pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Nilai total ekonomi areal HKm Amapolo

Kategori Manfaat	Nilai Manfaat Ekonomi	Persentase
Nilai guna langsung	298.250.000	3,79
Nilai guna tidak langsung		
- Nilai manfaat air rumah tangga	102.480.000	1,30
- Nilai penyerapan karbon	7.352.640.000	93.38
- Nilai manfaat pilihan	120.839.040	1,53
Total :	7.874.209.040	100,00

Sumber : Data Primer diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai ekonomi areal HKm Amapolo dari nilai guna tidak langsung lebih besar dari nilai langsungnya. Dilihat dari proporsi masing-masing kategori terhadap nilai total ekonomi HKm Amapolo maka nilai paling tinggi adalah manfaat tidak langsung sebesar 94,68% hal ini membuktikan bahwa nilai ekologi HKm Amapolo sangatlah penting bagi kehidupan manusia yaitu melindungi manusia dari bahaya banjir, tanah longsor, serta pemasok oksigen bagi manusia. Manfaat langsung dari areal HKm sebesar 3,79% membuktikan bahwa HKm masih memiliki peranan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama sebagai sumber penghasilan memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Nilai terkecil dari proporsi total nilai manfaat ekonomi HKm yaitu nilai manfaat pilihan sebesar 1,53%. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan perhutanan sosial (Rahayu dan Triwanto, 2021)

Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

Untuk memperoleh formuasi strategi yang tepat, maka digunakan analisa SWOT, yang diawali dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Hasil skoring faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan HKm yang diperoleh berdasarkan rating dan pembobotan terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dibuat berdasarkan pendapat para pemangku kepentingan, secara lengkap skoring disajikan pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*)

Untuk Pengelolaan Hutan Masyarakat di Poktan Amapolo

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan				
1	Masih memiliki izin pengelolaan HKm 35 Tahun	0.13	4	0.52
2	Terdapat potensi HHBK dan TEV	0.12	4	0.48
3	Tersedianya aksesibilitas menuju areal HKm	0.11	3	0.33
4	Tingginya peran fasilitator	0.12	4	0.48
Jumlah Kekuatan		0.48		1.81
Kelemahan				
1	Tingginya ketergantungan petani pada pedagang pengepul	0.10	3	0.30
2	Belum optimalnya fungsi kelembagaan HKm	0.10	4	0.40
3	Ketergantungan pada bantuan Pemerintah	0.11	4	0.44
4	Petani tidak punya modal untuk berusaha tani	0.08	3	0.24
5	Batas areal IUPHKm yang belum pasti	0.08	3	0.24
6	Belum tersentuh teknologi	0.05	1	0.05
Jumlah Kelemahan		0.52		1.67
TOTAL		1		3.48

Sumber : Data Primer diolah

Variabel internal kekuatan relatif, masih memiliki izin pengelolaan HKm, menerima skor sebesar 0.52. Variable Tersedianya aksesibilitas menuju areal HKm menerima skor sebesar 0.33 terkecil. Tabel. 8 menunjukkan evaluasi variabel internal kelemahan berdasarkan temuan wawancara dengan para pakar dan pemilik izin hutan kemasyarakatan. Pada tabel ini, variabel yang relatif memiliki skor

tertinggi adalah ketergantungan pada bantuan Pemerintah, dengan skor 0.44. Variabel Belum optimalnya fungsi kelembagaan HKm skor 0.40, tingginya ketergantungan petani pada pedagang pengumpul menerima skor 0.30. Variabel Petani tidak punya modal untuk berusaha tani dan batas areal IUPHKm yang belum pasti memiliki skor 0.24. variabel yang memiliki skor terendah adalah variabel belum tersentuh teknologi dengan skor 0.05.

Tabel 9. Matriks EFAS (*Eksternal Factor Analysis Summary*)
Untuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Poktan Amapolo

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang				
1	Peningkatan permintaan pasar komoditi hasil hutan, khususnya HHBK	0.18	4	0.71
2	Minat stakholder dalam pengelolaan HKm	0.13	4	0.52
3	Adanya inovasi baru dari pemerintah daerah	0.09	3	0.27
4	Potensi sebagai KTH kreatif dalam pemanfaatan bantuan pemerintah	0.10	4	0.40
Jumlah Kekuatan		0.50		1.91
Ancaman				
1	Semakin meningkat kebutuhan petani	0.17	4	0.68
2	Perambahan hutan akibat terbukanya akses jalan (<i>open acces</i>)	0.13	4	0.52
3	Batas kawasan hutan yang belum jelas (belum TTB)	0.11	3	0.33
4	Tingginya intensitas kebakaran hutan pada musim kemarau	0.09	3	0.27
Jumlah Kelemahan		0.50		1.80
TOTAL		1		3.71

Sumber : Data Primer diolah

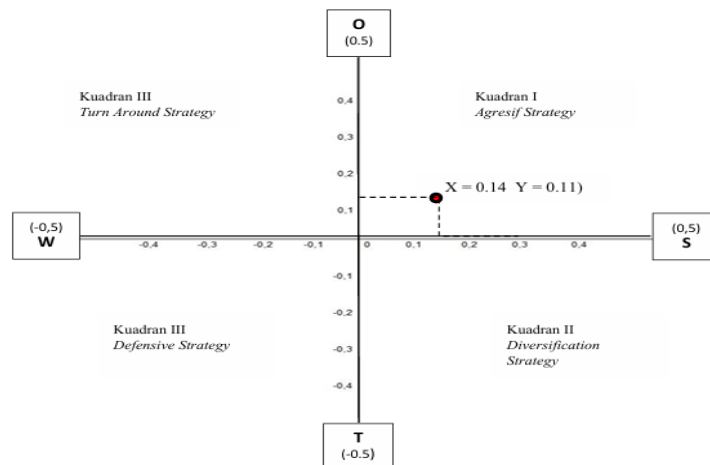
Menurut hasil wawancara dengan pemilik izin hutan kemasyarakatan dan pakar, evaluasi variabel peluang disajikan dalam Tabel 6. Tabel ini menunjukkan bahwa peningkatan permintaan pasar komoditi hasil hutan, khususnya HHBK, dengan nilai 0.71. Variabel yang mempunyai skor terendah yaitu penerapan alat ekonomi produktif skor 0.27. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemilik izin hutan kemasyarakatan (KTH) dan para pakar diperoleh evaluasi variabel-variabel eksternal ancaman seperti yang disajikan pada Tabel 5.16. Berdasarkan data pada tabel ini dapat diketahui bahwa variabel yang relatif mempunyai skor paling tinggi adalah variabel semakin meningkatnya kebutuhan petani dengan skor 0.68. Variabel yang mempunyai skor terendah yaitu Tingginya intensitas kebakaran hutan pada musim kemarau dengan skor 0.27.

Tabel 10. Pembobotan untuk Diagram SWOT Faktor Internal dan Eksternal

Uraian	Faktor Internal		Faktor Eksternal	
	Kekuatan	Kelemahan	Ancaman	Peluang
Bobot x Peringkat	1.81	1.67	1.91	1.80
Selisih		0.14		0.11

Sumber : Data Primer diolah

Menurut hasil pembobotan dari diagram SWOT faktor internal dan eksternal, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal kekuatan mencapai 1.8; faktor internal kelemahan mencapai 1.67; dan faktor eksternal peluang mencapai 1.9; dan faktor eksternal ancaman mencapai 1.80. Menurut data ini, posisi strategi pengembangan hutan kemasyarakatan berada di sel 1 dengan nilai koordinat (0.14; 0.11). Setelah mengumpulkan jumlah perbedaan antara faktor internal dan eksternal, diagram SWOT dapat dibuat, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Diagram SWOT strategi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Gambar 4 menunjukkan diagram SWOT di mana posisi hutan kemasyarakatan berada di sel kesatu. Kondisi ini menunjukkan HKm Amapolo memiliki kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang besar. Strategi dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Rangkuti 2015). Tabel 11 menunjukkan matriks SWOT untuk strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan di Poktan Amapolo.

Tabel 11. Matriks SWOT

Faktor	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Internal	- Masih memiliki izin pengelolaan HKm 35 Tahun - Terdapat potensi HHBK dan TEV - Tersedianya aksesibilitas menuju areal HKm - Tingginya peran fasilitator	- Tingginya ketergantungan petani pada pedagang pengumpul - Belum optimalnya fungsi kelembagaan HKm - Ketergantungan pada bantuan Pemerintah - Petani tidak punya modal untuk berusaha tani - Batas areal IUPHKm yang belum pasti - Belum tersentuh teknologi
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang (O)		
1. Adanya permintaan pasar komoditi hasil hutan, khususnya HHBK	1. Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) secara kolaboratif berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan	1. Restrukturisasi ulang kelembagaan kelompok
2. Minat stakholder dalam pengelolaan HKm	2. Peningkatan ekonomi KTH berbasis HHBK dan TEV	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan

3. Penerapan alat ekonomi produktif		3. Melakukan pola budidaya agroforestri
4. Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan HKm		4. Optimalisasi pemasaran HHBK secara efektif
Tantangan (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Semakin meningkat kebutuhan petani	1. Pemilihan tanaman MPTs menjadi primadona KTH	1. Penguatan kelembagaan petani HKm
2. Perambahan hutan akibat terbukanya akses jalan (<i>open acces</i>)	2. Perlindungan, pengamanan, dan penataan areal HKm	2. Penataan dan penegasan areal HKm
3. Status kawasan hutan yang belum pasti (belum di tata batas)		
4. Tingginya tingkat kebakaran hutan pada musim kemarau		

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan strategi yang dianalisis pada Tabel 11, dapat ditentukan bahwa rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan HKm kedepan agar tetap berkelanjutan baik secara kelola kawasan dan kelola usaha yang telah tertuang dalam Tabel 12 rekomendasi perbaikan pengelolaan HKm dari strategi *Strengths* dan *Oppurtunities* (SO).

Tabel 12. Rumusan Perbaikan Pengelolaan HKm dari Strategi *Strengths Oppurtunities* (SO)

Strategi <i>Strengths Oppurtunities</i> (SO)	Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan HKm
Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) secara kolaboratif berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan	Upaya untuk mendukung dan memperkuat KTH melalui kerjasama berbagai pihak yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas KTH dalam mengelola dan memanfaatkan potensi hutan secara lestari, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
Peningkatan ekonomi KTH berbasis HHBK dan TEV	Efektifitas program sosialisasi kemitraan kewirausahaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk HHBK dan TEV yang berkelanjutan.

Sumber : Data Primer diolah

Alternatif Strategi Pengelolaan HKm

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi pengembangan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di KTH Amapolo menggunakan strategi gabungan *Strengths* dan *Oppurtunities* (kekuatan dan peluang). Oleh karena itu, alternatif strategi yang diusulkan meliputi :

1. Pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) secara kolaboratif berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan.

Dalam Perhutanan Sosial, pendampingan sangat membantu KTH untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan usaha produktif, dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan. Pendampingan diperlukan dalam hal pengembangan usaha kehutanan sosial, terutama pendampingan cara menyusun rencana kelola bertahap mulai dari 1 tahun, 10 tahun hingga 35 tahun. Setelah memiliki RKPS masyarakat bisa membuat kelompok usaha untuk

mendorong komoditas unggulan daerahnya. Pendampingan dapat membantu KTH dalam menyusun rencana pengelolaan hutan, melakukan pemetaan partisipatif, membentuk kelembagaan, dan mengelola usaha secara berkelanjutan.

Rekomendasi peran pendampingan KTH :

- 1) Kapasitas SDM: Pendampingan membantu KTH meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya dalam pengelolaan hutan, termasuk teknik budidaya, pengolahan hasil hutan, dan pemasaran.
 - 2) Pengembangan Usaha Produktif: Pendampingan membantu KTH merencanakan dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan, seperti budidaya HHBK, agroforestri, atau usaha pengolahan dan pemasaran produk hutan.
 - 3) Peningkatan Kepedulian: Pendampingan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran anggota KTH tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya hutan.
 - 4) Kolaborasi: Pendampingan yang efektif melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, penyuluh kehutanan, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada KTH.
2. Peningkatan ekonomi KTH berbasis HHBK dan TEV

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada masyarakat pada suatu periode tertentu. Kegiatan sumber daya hutan yang baik mampu memberikan manfaat langsung (*direct use value*) dan tidak langsung (*indirect use value*) dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Wirakusuma (2003), hasil hutan merupakan sumber daya ekonomi potensial yang beragam yang menghasilkan sederetan hasil hutan serbaguna baik hasil hutan kayu dan non kayu maupun hasil hutan yang tidak kentara (*intangible*). Peningkatan ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan TEV dapat dicapai melalui beberapa cara, seperti sosialisasi kemitraan kewirausahaan, pendampingan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan peningkatan kualitas produk HHBK. KTH dapat memanfaatkan potensi HHBK dan TEV yang ada di sekitarnya untuk mengembangkan usaha.

Rekomendasi Peningkatan Ekonomi KTH berbasis HHBK dan TEV:

- 1) Sosialisasi Kemitraan Kewirausahaan: KTH perlu diberikan sosialisasi tentang kemitraan kewirausahaan berbasis komoditi HHBK dan TEV agar dapat lebih memahami peluang dan cara mengembangkan usaha mereka.
- 2) Pendampingan KPH: KPH dapat memberikan pendampingan teknis dan non-teknis, seperti memberikan rekomendasi komoditas HHBK potensial, membantu dalam proses produksi dan pemasaran, serta memberikan pelatihan kewirausahaan.
- 3) Peningkatan Kualitas Produk: KTH perlu meningkatkan kualitas produk HHBK mereka, misalnya dengan menggunakan teknologi pengolahan yang lebih modern atau dengan mengikuti pelatihan tentang pengolahan HHBK yang baik dan benar.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat, termasuk KTH, dalam pengelolaan HHBK dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang berkelanjutan.
- 5) Diversifikasi Komoditas: KTH juga dapat mengembangkan berbagai jenis HHBK, seperti cengkeh, pala, buah-buahan untuk meningkatkan diversifikasi pendapatan dan ketahanan ekonomi.
- 6) Pengembangan Bisnis: KTH dapat mengembangkan model bisnis yang inovatif, seperti koperasi atau perusahaan kecil, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan HHBK dan pemasaran produk.

- 7) Kerja Sama dengan Pelaku Usaha: KTH dapat bekerja sama dengan pelaku usaha, seperti pengusaha pengolahan atau pemasaran, untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai tambah produk HHBK.
- 8) Pengembangan Teknologi: KTH dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk HHBK, misalnya dengan menggunakan mesin pengolahan atau aplikasi pemasaran online.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil identifikasi kondisi ekologi, ekonomi dan sosial dievaluasi berdasarkan elemen berikut
 - a. Sudut pandang ekologi, areal HKm terjadi penurunan spesies berkayu karena dominansi petani terhadap tanaman pertanian dan perkebunan. Kondisi penutupan lahan tidak berhutan sangat rentang terhadap bahaya banjir, longsor dan erosi serta tingginya intensitas kebakaran hutan pada musim kemarau. Penanaman jenis kayu-kayuan pada areal terbuka di hutan lindung melalui kegiatan rehabilitasi akan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, serta menjaga sistem penyangga kehidupan.
 - b. Perspektif ekonomi, petani belum merasakan manfaat langsung dari program pengembangan ekonomi KTH berupa budidaya tanaman kopi tuni. Tersedianya HHBK dan TEV dapat dikembangkan untuk peningkatan perekonomian kelompok serta tetap mengembangkan budidaya tanaman perkebunan dan pertanian dengan pola agroforestri.
 - c. Kondisi sosial, terlihat bahwa program HKm di poktan Amapolo belum berjalan dengan baik karena kurangnya pengetahuan tentang organisasi dan kelembagaan, sehingga membutuhkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
2. *Stakeholder* HKm Amapolo dapat dibedakan perannya menjadi empat kategori.
 - a) *Player* : Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, BPSKL Maluku-Papua, KPHL Kota Ambon, Poktan dan Tengkulak
 - b) *Actor* : Masyarakat
 - c) *Bystander* : BPDAS HL Way Hapu Batu Merah, Pokja PS Maluku dan Pemerintah Negeri
 - d) *Subject* : Akademisi dan Anggota KTH
3. Strategi yang dapat dirumuskan dalam pengelolaan HKm adalah melakukan pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) secara kolaboratif berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan serta peningkatan ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) berbasis HHBK dan TEV.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Y.O., J. Pretzsch, D. Pettenella, 2013. Contribution of non-timber forest products livelihood strategies to rural development in dry lands of Sudan: Potentials and failures. *Agricultural System* 117: 90–97.
- Al Fajar. H.M., dan Chairul Sa'roni. 2022. Analisis Kelayakan Klusterisasi Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* Vol.5(1), pp: 354-372.
- Awang S.A., 2003. Politik kehutanan masyarakat. Centre for critical social studies Kerjasama dengan kreasi wacana Yogyakarta.

- Creswell JW, Poth CN. 2016. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Kadir A. W^{1*}), Awang S A²⁾, Purwanto R H (3), Erny Poedjirahajoe(2012. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *J Manusia dan Lingkungan* 19(1):1–11.
- Kaskoyo H, Mohammed A, Inoue M. 2017. Impact Of Community Forest Program In Protection Forest On Livelihood Outcomes: A Case Study Of Lampung Province, Indonesia. *Journal Of Sustainable Forestry*. 36(3):250–263. Doi:10.1080/10549811.2017.1296774. [Diunduh 2023 Mar 8].
- Makkarennu., Syahidah, Ridwan, Muh Alif K Sahide, Emban Ibnu Rusyd Mas'ud. 2018. Pengembangan Pasar dan Penguatan Kapasitas Kewirausahaan Kelompok Tani Hutan di Sekitar Kaawasan Hutan Pendidikan Unhas. *Jurnal Panrita Abdi*, Vol 2(1), pp: 64-74.
- Patton MQ. 1990. *Qualitative Evaluation And Research Methods*, 2nd Ed. *Qualitative Evaluation And Research Methods*, 2nd Ed.:532–532.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. pp: 251-265.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 854/MENLHK/2004 tanggal 29 September 2004
- Surat Keputusan Kepala BPSKL Wilayah Maluku Papua Nomor: S.44/BPSKL-TU/PSL.02/1/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang Rencana Kelola Perhutanan Sosial PPHKm Amapolo Periode 2021 sampai 2030
- Rangkuti, F., (2006). *Analisis SWOT Teknik membelah kasus bisnis*. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyanto H. 2017. *Hutan Kemasyarakatan: Hidup Matinya Petani Miskin*. Bogor: Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan (K.P. SHK).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukwika T, Darusman D, Kusmana C, Nurrochmat DR. 2016. Biodiversitas *Journal Of Biological Diversity*. 17(1).
- Latupapua. Th. Y, Pudyatmoko. S., Baiquni M. 2015. Implementasi Peran Stakeholder dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Agroforestri*. Vol 10 (1), pp:21-30.
- Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan A. dan Banuwa I. 2017. Aspek Sosial Ekonomi pada system Agroforestri di Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari* Vol 5(3), pp: 95-103.
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. Penyuluhan perhutanan sosial diKelompok Tani Hutan Kota Malang. Budimas: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3(2), pp: 1-13.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku dan Papua Revisi I Tahun 2020-2024.

Rosalia, F., dan Ratnasari, Y. 2016. Analisis Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Sekitar Kawasan Hutan lindung Register 30 Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Tahun 2010. *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 18(1), pp: 34-38.

Safe'i, R., Febryano, I. G., & Nur, L. A. 2018. Pengaruh Keberadaan Gapoktan Terhadap Pendapatan Petani dan Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol 20(2): 109-114.

Zeilika, E., Kaskoyo, H., Wulandari, C. 2021. Pengaruh Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Terhadap Kesejahteraan Petani. *Jurnal Hutan Tropis*. Vol ((2)), pp: 291-300.